

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DI KANTOR DESA KENTEN LAUT KECAMATAN TALANG KELAPA
KABUPATEN BANYUASIN**

Oleh :

**Siti Uly Matun Sa'diyah ; Nim : 21.11.043
Program Studi : Administrasi Publik**

ABSTRACT

SITI ULLY MATUN SA'DIYAH. 2025. The Role of the Village Head in Improving Village Community Empowerment at the Kenten Laut Village Office, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. Thesis, Public Administration Study Program, Satya Negara College of Administrative Sciences, Palembang. Primary Advisor: M. Sattarudin, S.Sos., M.Si. Assistant Advisor: Hj. Helda Fitriani, S.Pd., M.Si.

Community empowerment is an important strategy in promoting village progress and independence. The village head, as the highest leader at the village level, plays a strategic role in mobilizing the community to become more empowered, both economically, socially, and culturally. This research was conducted in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency to determine the extent of the village head's role in improving community empowerment and the factors influencing it.

This research used qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research results show that the Kenten Laut Village Head has played a role in fostering, motivating, and involving the community in empowerment programs. However, obstacles remain, such as a lack of active community participation and limited resources.

The research results indicate that the Kenten Laut Village Head has fulfilled his role in fostering, motivating, and involving the community in various empowerment programs. However, several obstacles remain, such as a lack of active community participation and limited human resources. Therefore, it is recommended that the village head improve communication and coordination with the community and village officials to ensure a more optimal and sustainable empowerment process.

Keywords: Role of the Village Head, Village Community Empowerment.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan unit paling penting dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan segala program pemerintahan. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat desa adalah dengan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek

penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau juga sering diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi di tingkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Perannya sangat strategis dalam pembangunan desa, termasuk dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama

dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materil hingga non materil dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu alternatif mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Desa Kenten Laut, seperti usaha dalam meningkatkan kesejah-teraan masyarakat. Ditambah pengadaan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Kenten Laut untuk meningkatkan kepuasan, kenyamanan dalam pelayanan terhadap masyarakatnya. Sehingga baik dalam visi, misi dan fungsi dari Desa Kenten Laut harus mengkondisikan perlu adanya suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada tanggal 18 November 2024 di Kantor Desa Kenten Laut maka penulis menemukan indikasi masalah sebagai berikut.

1. Kepala Desa Kenten Laut diduga belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai Pembina masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga terhadap program pembangunan desa.
2. Diduga program pemberdayaan masyarakat masih mengalami hambatan, baik dari segi sumber daya manusia, pendanaan, maupun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.
3. Diduga koordinasi antara kepala desa dan pengurus desa lainnya masih lemah, sehingga sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana

peranan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi penulis
Sebagai informasi dan menambah wawasan bagi penulis tentang bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
2. Bagi kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Bagi kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dijadikan sebagai bahan masukan.
3. Bagi Lembaga STIA Satya Negara
Sebagai informasi bagi dosen maupun mahasiswa bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

B. LANDASAN TEORI

Peranan Kepala Desa

Peranan kepala desa sangat penting dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ia tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang baik, kepala desa dapat menciptakan harmoni, kemakmuran, dan keberlanjutan di wilayah desa.

Pengertian Peranan

Peranan (*role*) menurut (Soekanto, 2009:212-213) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peranan mencakup tiga hal menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213), sebagai berikut.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubun-

kan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Jenis-jenis Peranan

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut.

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah seorang pemimpin yang memegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala desa memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola dan memimpin pemerintahan desa, serta menjalankan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Kepala desa bertanggung jawab atas berbagai aspek yang mencakup administrasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta

pengembangan sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Secara menyeluruh, pengertian kepala desa mencakup beberapa aspek sebagai berikut.

1. Penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala desa bertugas untuk menjalankan pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala desa memiliki peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, dan peningkatan ekonomi lokal.
3. Pemimpin Sosial dan Budaya, sebagai tokoh sentral di desa, kepala desa juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial dan budaya di desa.
4. Pendidikan dan Kesehatan, Kepala desa bertanggung jawab untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi warganya, dengan memfasilitasi pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta program-program kesejahteraan yang mendukung masyarakat desa.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kepala desa juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup desa secara berkelanjutan. Ini termasuk mengatur pemanfaatan tanah, hutan, air, serta menjaga kebersihan dan kelestarian alam desa.
6. Pemilihan Kepala Desa, Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dilakukan setiap 6 tahun sekali.

Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan APB Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian

desa.

9. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
10. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
12. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa.
13. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa.
14. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
15. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
16. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak sebagai berikut.

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan cuti.
5. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
6. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Mentaati dan menegakkan peraturan

- perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
 9. Mengelola keuangan dan aset desa.
 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
 13. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa.
 14. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa.
 15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
 16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mereka mampu memaksimalkan potensi, kemandirian, dan kesejahteraan hidupnya. Upaya ini mencakup penguatan akses terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pengambilan keputusan yang berkeadilan, sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan atau pemberian bantuan sesaat, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan hidup jangka panjang.

Proses pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, dan pelaksanaan program, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendekatan ini mengakui peran masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Selain itu, pemberdayaan juga harus inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang

gender, usia, atau status sosial, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap peluang.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Istilah pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan derajat otonomi dan penentuan nasib sendiri seseorang untuk memungkinkan mereka mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak sesuai dengan otoritas mereka.

Sehingga dengan proses ini akan menjadi lebih kuat dan percaya diri terutama dalam mengatur hidupnya dan menuntut haknya. Di sisi lain, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris *empowerment*, berasal dari kata “daya” dengan awalan ber- menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kekuatan. Daya berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti memiliki kekuatan.

Demikian pula Pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosialbudaya. Menurut Mardikanto (2013: 109), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

1. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*).

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan Usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan Pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi menurut (Theresia, 2014:112-114) sebagai berikut.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
4. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses Pemberdayaan masyarakat menurut United National (1956:63-69) dalam buku Hadiwijoyo (2012:29-30) ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui masyarakat sekitar, yaitu dengan mengetahui karakteristik masyarakat lokal yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat Desa yang satu dengan yang lainnya.
2. Mengumpulkan pengetahuan tentang masyarakat setempat, yaitu dengan mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat.
3. Mengidentifikasi pemimpin lokal, yaitu semua cara pemberdayaan masyarakat bakal sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pemimpin masyarakat tersebut. Untuk itu faktor "the local leader" harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
4. Merangsang masyarakat untuk menyadari bahwa sedang bermasalah, pada masyarakat yang terikat terdapat adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.
5. Membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya, memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk berbicara tentang masalah dan membentuk pengaturan dalam suasana kebersamaan.
6. Membantu orang dalam mengidentifikasi masalah mereka yang paling mendesak, masyarakat harus diberdayakan agar mampu mengidentifikasi masalah yang paling menekan yang harus dipecahkan.
7. Menumbuhkan rasa percaya diri, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Rasa percaya diri adalah modal utama masyarakat untuk berswadaya.
8. Memutuskan tindakan program, masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan.
9. Pengakuan kekuatan dan sumber daya, memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan dan memenuhi kebutuhannya.
10. Membantu masyarakat untuk terus bekerja untuk memecahkan masalahnya, pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang berkesinambungan.



11. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong diri sendiri, salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat.

Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah dinyatakan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Berkurangnya Penduduk Miskin, mengukur keberhasilan program pemberdayaan dalam menurunkan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, menggambarkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup mereka.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan, menunjukkan sejauh mana masyarakat memperoleh peningkatan keterampilan, kemampuan, dan akses ekonomi yang lebih merata di antara semua lapisan masyarakat

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat (2001:12) Strategi Pemberdayaan adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang diterapkan. Sedangkan menurut Suyono dalam M. Anwas (2014:89)

Strategi Pemberdayaan merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:167) Strategi Pemberdayaan Masyarakat meliputi strategi sebagai suatu rencana, strategi sebagai kegiatan, strategi sebagai suatu instrumen, strategi sebagai sistem dan strategi sebagai pola pikir. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:171-172) mengemukakan strategi pemberdayaan 5P (lima) yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas satu variabel secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variabel yang diteliti (Sapto Haryoko dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 2016).

Agar tercapainya tujuan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Gambar Kerangka Berpikir



PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penyusunan penelitian ini. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian ini untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode penelitian yaitu peneliti langsung mendatangi kantor Desa Kenten Laut untuk menganalisa data secara sistematis, fakta serta akurat mengenai objek yang berbasis data berbentuk kalimat dan data. Metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

3.2 Definisi Konsep

Definisi konsep yang digunakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu, yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Definisi konsep dengan menggunakan satu istilah yang beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain yaitu :

1. Peranan Kepala Desa adalah sangat penting dalam pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesempatan pada masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015) definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Peranan Kepala Desa (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015)	1. Pembinaan Masyarakat 2. Penyelenggaraan Pembangunan 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Menjaga Hubungan Kemitraan
2.	Pemberdayaan Masyarakat (UU Nomor 25 Tahun 2000)	1. Berkurangnya Penduduk Miskin 2. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan 3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan

komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa informan penelitian sebagai sumber informasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3
Informan Penelitian

No.	Sumber Informan	Jumlah
1	Ketua BPD	1 orang

2.	Anggota BPD	1 orang
3.	Sekretaris Desa	1 orang
4.	Staf Pegawai Desa	2 orang
5.	Masyarakat	2 orang
Jumlah		7 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu seorang peneliti harus terampil, tekun, sabar, dan tidak putus asa dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Dalam hal ini peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian guna mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan dan akan mengobservasikan tentang Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara

Disini penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung Sekretaris Desa, staf pegawai Desa dan Masyarakat Desa yang ada disana, penulis melakukan wawancara tersebut guna mendapatkan data yang tepat dan akurat dalam penelitian ini. Sumber data sekunder penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Dokumentasi juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan membaca buku dan mencari referensi. Studi Pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan dari buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan ataupun sebagai dasar untuk Teknik Analisis Data.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012:246) adalah analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas dan datanya sudah jenuh. Aktivitas tersebut dimulai dari data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing*.

1. Reduksi Data/*reduction*

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang sedemikian rupa data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan data yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data/*Display*

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga mudah menghasilkan kesimpulan. Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif atau berbentuk catatan di lapangan.

3. Verifikasi/*Conclusion drawing*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil data dan tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai. Data yang telah disusun kemudian dibandingkan dengan melihat persamaan dan perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan Pada bab terdahulu, bahwa untuk mendapatkan data mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi, penulis melakukan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara yang berpedoman kepada pedoman wawancara.

Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa indikator Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin, sebagai berikut.

Peranan Kepala Desa

Dalam menjalankan peranannya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan Kepala Desa dalam peranannya sebagai pemimpin di Desa Kenten Laut yaitu sebagai berikut.

1. Pembinaan Masyarakat

Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas.

Hal ini kita bisa kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa. Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses untuk membuat penulis menyimpulkan bahwa masyarakat menjadi berdaya guna. Setiap anggota masyarakat dalam suatu komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan dan kemampuan untuk membawa diri dan komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa dikembangkan karena faktor-faktor tertentu.

2. Penyelenggaraan Pembangunan

Desa bertujuan meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan kesejahteraan masyarakat desa kualitas hidup manusia setara penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan pada

prinsipnya sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh masyarakat atau warga setempat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari apa yang dirasakan sebelumnya.

Dengan adanya masyarakat yang berpengalaman dipastikan pembangunan yang dikerjakan akan dapat memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan keterangan informan diatas dapat dikatakan Pemerintah desa atau kepala desa berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan khususnya desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin, penyelenggaraan Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah. dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya keberhasilan pada masa sekarang dan masa yang akan datang Keberhasilan pembangunan desa pada akhirnya berarti juga keberhasilan pembangunan nasional.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Ibu Kepala Desa Kenten Laut benar-benar telah melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desanya. Sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat.

Diantaranya meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pertanian, meningkatkan kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian warga, masyarakat, meningkatkan taraf hidup.

4. Menjaga Hubungan Kemitraan

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa Memang dalam aturannya Pemerintah Desa dengan BPD merupakan mitra tetapi dalam kenyataannya sering terjadi praktek yang berbeda. Oleh karena itu

hubungan kemitraan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dengan BPD akan membawa dampak negatif pada penyelenggaraan Pemerintahan desa.

BPD sebagai lembaga independen dalam tata pemerintahan desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi, hal ini akan dicerminkan dari mulai rujuknya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan di antara mereka.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Selain indikator penentu keberhasilan peranan Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri juga memiliki indikator-indikator penentu keberhasilan yaitu sebagai berikut.

1. Berkurangnya Penduduk Miskin

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Masalah ini merupakan masalah pembangunan multidimensional.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah yang masalah kemiskinan dan langkah-langkah pemecahannya. Pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan dalam menyikapi kemiskinan ini adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa untuk menunjang kemajuan pertanian pemerintah harus mendorong petani dengan cara memberikan bantuan baik itu pendanaan atau pun pupuk yang mereka gunakan selain itu pemerintah juga harus memperhatikan akses yang mereka gunakan untuk mengangkut hasil panennya, yaitu dengan cara memperbaiki jalan-jalan yang rusak, jembatan yang rusak serta memperhatikan alat angkut yang masyarakat gunakan, dengan begitu pertumbuhan perekonomian pedesaan akan bisa maju dan penduduk miskin akan berkurang serta masyarakat dapat hidup sejahtera.

2. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap terhadap Upaya Peningkatan

Kesejahteraan

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan suatu desa. Cara perwujudan tujuan tersebut yaitu dengan membentuk program pengentasan kemiskinan. pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Namun dibutuhkan juga kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta diantara pihak tidak ada yang saling menyalahkan agar kesejahteraan lebih mudah tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting sehingga pemerintah desa dalam melakukan pembangunan selalu melibatkan partisipasi baik itu dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan perlu dilakukan demi terwujudnya masyarakat pemerataan sejahtera kesenjangan antar daerah, yang antar sektor, dan antar golongan ekonomi akan makin mengecil karena pembangunan yang makin merata, sehingga penduduk miskin diharapkan akan dapat makin berperan serta dalam pembangunan.

Pembangunan jalan dan pengembangan sarana perhubungan telah memperlancar mobilitas barang dan jasa dari satu desa ke desa lain, sehingga kebutuhan hidup masyarakat makin mudah diperoleh. Sementara itu, dengan makin tersesarnya sarana dan luasnya jangkauan komunikasi, maka kebutuhan informasi bagi masyarakat makin terpenuhi, yang menunjang berkembangnya perekonomian.

Pembahasan

Adapun Pembahasan dari penelitian sebagai berikut.

Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan dari hasil penelitian adapun peranan kepala desa adalah sebagai berikut.

Peranan Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dan observasi

peneliti dilapangan bahwa Kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai berikut.

1. Pembinaan Masyarakat

Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan diketahui bahwa kepala desa telah menjalankan pembinaan masyarakat melalui berbagai pendekatan, terutama dalam membina perangkat desa dan masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Kepala desa juga berperan dalam memberikan motivasi kepada warga untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, seperti lahan pertanian dan potensi perikanan, guna meningkatkan ekonomi desa.

2. Penyelenggaraan Pembangunan

Penyelenggaraan Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kualitas hidup manusia setara penanggulangan Lemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan prasarana sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan diketahui bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam mendukung proses pembangunan desa, terutama dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kepala desa aktif mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, saluran irigasi, serta fasilitas umum lainnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan diketahui bahwa peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan kepala desa dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan.

4. Menjaga Hubungan Kemitraan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara formal, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan diketahui bahwa kehadiran BPD memberikan ruang gerak yang positif dalam demokrasi desa, terutama dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Sebagai lembaga independen, BPD menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa dan berperan sebagai parlemen desa, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

Selain itu pemberdayaan sendiri juga memiliki indikator-indikator penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut.

1. Berkurangnya Penduduk Miskin

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Salah satu langkah penting adalah mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya sektor pertanian sebagai sumber penghidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan diketahui bahwa angka kemiskinan di Desa Kenten Laut mulai menurun berkat program pemberdayaan dan bantuan sosial dari pemerintah desa, dan wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa hasil

pertanian dan perkebunan mulai meningkat, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat.

2. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dalam pembangunan suatu desa. Cara perwujudan tujuan tersebut yaitu dengan membentuk program pemberdayaan kemiskinan, masyarakat, dan sebagainya. Meningkatkan kepedulian masyarakat berarti mendorong kesadaran kolektif agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dalam proses pembangunan, termasuk dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan diketahui bahwa menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan semakin meningkat. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, baik dalam musyawarah desa maupun pelaksanaan program sosial dan ekonomi. Informan menyebutkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya keterlibatan mereka, tidak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga ide dan aspirasi yang disampaikan dalam forum-forum resmi desa.

3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan perlu dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi akan makin mengecil karena pembangunan yang makin merata. sehingga penduduk miskin diharapkan akan dapat makin berperan serta pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan informan di Desa Kenten Laut, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembangunan sarana fisik seperti jalan desa, listrik, serta akses komunikasi yang memadai. Infrastruktur yang semakin baik ini mempermudah masyarakat dalam menjual hasil pertanian dan memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Banyuasin

1. Faktor Pendukung yaitu komunikasi yang terbuka antara kepala desa dan masyarakat. Kepala desa berperan aktif dalam memberikan informasi serta membangun kedekatan emosional dengan warganya melalui pendekatan kekeluargaan. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, sehingga program pemberdayaan yang dijalankan dapat diterima dengan baik.
2. Faktor Penghambat yaitu faktor yang dihadapi kepala desa meliputi kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat dalam mengikuti program-program pemberdayaan. Sebagian masyarakat masih berorientasi pada bantuan jangka pendek dan belum memiliki pola pikir kemandirian, sehingga sulit menerima perubahan yang ditawarkan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menjalankan peran strategisnya sebagai pemimpin, pembina, motivator, dan penggerak dalam pembangunan desa. Kepala Desa tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga aktif dalam membangun kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi warga, serta melibatkan masyarakat dalam berbagai program seperti pelatihan keterampilan, budidaya ikan, seperti tambak lele dan saur organik, kegiatan sosial, seperti mengadakan sosialisasi. Peranan tersebut telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kapasitas masyarakat, berkembangnya potensi ekonomi desa.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, sebagai berikut.
 - a. Faktor Pendukung, yaitu kepemimpinan kepala desa yang bersifat terbuka,

komunikatif, dan memiliki kedekatan dengan masyarakat. Kepala desa yang memahami kondisi sosial masyarakat serta mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal seperti perangkat desa maupun eksternal seperti lembaga pemerintah, dinas teknis, dan organisasi sosial, menjadi kekuatan besar dalam proses pemberdayaan.

- b. Faktor Penghambat, antara lain rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat yang masih bersifat pasif, ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta keterbatasan dalam hal pendidikan dan keterampilan yang membuat beberapa warga belum mampu secara mandiri mengelola program pemberdayaan. Selain itu, kendala anggaran desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan jangka panjang dari pemberdayaan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala desa.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepala Desa hendaknya meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperluas jangkauan program, meningkatkan komunikasi dua arah dengan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan lembaga-lembaga pendukung agar program pemberdayaan di Desa Kenten Laut semakin maju dan berkelanjutan.
2. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi keaktifan masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah desa. Masyarakat sebaiknya tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut andil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., & Supriadi, D. (2023). Program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan kewirausahaan. Bandung Barat : Jurnal terbuka
- Arif Purbantara, Mujianto. (2019). *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, E. Y. (2019). *Tugas Kepala Desa Dalam Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Jurnal Hukum.
- Huraerah, A. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Margayaningsih, D.A., (2023) tentang peran aktif masyarakat Desa Waung dalam kegiatan pemberdayaan. Jakarta : Jurnal terbuka
- Mofizar, M.A., 2015, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Tahun 2013- 2014*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Mustanir, A., Muhammadiyah, U., & Rappang, S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Entrepreneurship Community Empowerment*. Jurnal, February.
- Oktarina, Renni. 2023. *Lingkungan Desa Kenten Laut dan profil Desa Kenten Laut*. Banyuasin.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soetomo, 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRES
- Supardi, dkk. 2024. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang: STIA Satya Negara.
- Sutoro Eko. (2012). *Membangun Desa Membangun Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Desa.
- Suwanti, 2016, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, e-Journal Administrasi Negara, 2016, 4 (1) : 2234-2248 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.
- Tjokroamidjojo, B. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali.
- Totok, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Perss



Zuhaqiqi. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000-2004 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

